

Jurnal Penelitian Hukum De Jure adalah majalah hukum triwulan (*Maret, Juni, September dan Desember*) diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan **IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA (IPHI) Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-13.AHA.01.07 Tahun 2013, Tanggal 28 Januari 2013**, bertujuan sebagai wadah dan media komunikasi, serta sarana untuk mempublikasikan aneka permasalahan hukum yang aktual dan terkini bagi para peneliti hukum Indonesia khususnya dan kalangan masyarakat pemerhati hukum pada umumnya.

Penanggung Jawab

Ma'Mun, Bc.I.P., S.H., M.H.

(Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Pemimpin Umum

Henry Donald Lbn Toruan, S.H.,M.H.

(Ketua Ikatan Peneliti Hukum Indonesia)

Wakil Pemimpin Umum

T. Daniel L Tobing, S.H.,

(Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Peneliti Hukum dan Hak Asasi Manusia)

RR. Risma Indriyani, S.H.,M.Hum

(Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum)

Pemimpin Redaksi

Ahyar Ari Gayo, S.H.,M.H.,APU (Hukum Islam, BALITBANGKUMHAM)

Anggota Dewan Redaksi

Marulak Pardede, S.H.,M.H.,APU (Hukum Ekonomi BALITBANGKUMHAM)

Syprianus Aristieus, S.H.,M.H (Hukum Perusahaan, BALITBANGKUMHAM)

Jamilus, S.H.,M.H (Hukum Perdata, BALITBANGKUMHAM)

Nevey Varida Ariani, SH.,M.H, (Hukum Pidana, BALITBANGKUMHAM)

Eko Noer Kristiyanto, S.H, M.H. (Hukum Tata Negara, BALITBANGKUMHAM)

Muhaimin, S.H., (Hukum Islam, BALITBANGKUMHAM)

Redaksi Pelaksana

Fitriyani, S.H.,M.Si.

Jaya Laksana, S.E

Sekretaris

M. Virsyah Jayadilaga, S.Si.,M.P

Asmadi, S.H

Tata Usaha

Dra. Evi Djuniarti, M.H

Suwartono

Teknologi Informasi dan Desain Layout

Risma Sari, S.Kom.M.Si (Teknologi Informasi)

Machyudhie, S.T. (Teknologi Informasi)

Saefullah, S.ST.,M.Si., (Teknologi Informasi)

Agus Priyatna, S.Kom. (Desain Layout)

Mitra Bestari

Prof.DR. Rianto Adi, S.H. (Sosiologi Hukum , FH. ATMA JAYA JAKARTA)
DR. Ahmad Ubbe, S.H.,M.H. APU (Hukum Pidana dan Adat BALITBANGKUMHAM)
DR. Farhana, S.H.,M.H.(Hukum Pidana, F.H. Univ. Islam Jakarta)
DR. Hadi Supratikta, (Hukum Administrsasi Negara, BALITBANG KEMENDAGRI)
DR. Ridwan Nurdin, MA (Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum
Univ. Islam Negeri Arraniri Banda Aceh)

Alamat Redaksi:

Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
Jl. HR. Rasuna Said Kav.4-5, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon, (021) 2525015, Faksimili (021) 2526438

Email :

jurnaldejure@yahoo.com
ejournaldejure@gmail.com

Percetakan

PT Pohon Cahaya

Jalan Gedung Baru 18 Jakarta Barat 11440
Telpon (021) 5600111, Faksimili (021) 5670340

Redaksi menerima naskah karya asli yang aktual dalam bidang hukum berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti: peneliti hukum, praktisi dan teoritisi, serta berbagai kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, bukan pendapat redaksi.

Redaksi berhak menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang tidak mengubah isinya. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 halaman A4, diketik spasi rangkap dikirim melalui Email jurnaldejure@yahoo.com atau melalui aplikasi Open Journal System (OJS) pada URL/website:ejournal.balitbangham.go.id.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	
ADVERTORIAL	
KUMPULAN ABSTRAK	
Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh (<i>Legal Aspect Of Qanun Jinayat in Aceh Province</i>)	131 - 154
Ahyar Ari Gayo	
Hak Dasar Manusia Dalam Hukum Kontrak Indonesia: Analisis Kritis Syarat Kontrak (<i>Fundamental Rights in Indonesia Contract Law: Critical Analysis of Term Contract</i>)	155 - 176
Zulfirman	
Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Hukum Dalam Memperkuat Ketahanan Nasional (<i>Policy and strategy of law development to strengthen national resilience</i>).....	177 - 193
Danang Risdiarto	
Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (<i>The Legal Protection of Intellectual Property In Order To Improve The Welfare Society</i>)	195 - 208
Taufik H. Simatupang	
Globalisasi, Perdagangan Bebas, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (<i>Globalization, Free Trade, Investment and One Integrated Center Service</i>)	209 - 230
Syprianus Aristeus	
Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar dan Kelas I Khusus Bandara I Gusti Ngurah Rai (<i>Law Enforcement for Foreigners in The Office of Immigration Denpasar and Airport I Gusti Ngurah Rai</i>)	231 - 247
Okky Chahyo Nugroho	
Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (<i>The Application Of The Rights Of Inmates In Correctional Institution Clas I A Tanjung Gusta, North Sumatra Reviewed From The Perspective Of Human Rights</i>)	249 - 263
Donny Michael	

Kepastian Hukum Bagi Pengguna Penyalahgunaan Narkotika: Studi Kasus Di Provinsi Jawa Timur (<i>Legal Certainty For The Drug Abusers of Narcotics: Case study in East Java</i>)	265 - 282
Tony Yuri Rahmanto	
Persoalan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Sertifikat Dan Hak Tanggungan (<i>The Problem in The Implementation of Execution Certificate and Rights of Dependents</i>)	283 - 299
Jamilus	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	301 - 303
PEDOMAN PENULISAN	305 - 307

ADVERTORIAL

Puji syukur kehadiran Allah SWT, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* yang diterbitkan **Ikatan Peneliti Hukum Indonesia** bekerjasama dengan **Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI** bisa kembali menerbitkan Volume 17 Nomor 2 Juni 2017. Melalui kerja sama penerbitan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dikarenakan semakin aktifnya keterlibatan Mitra Bestari sesuai dengan kepakarannya. Terlebih lagi bahwa *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* di Tahun 2017 ini mulai pengelolaannya melalui Open Jurnal System.

Penerbitan *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* di edisi ini memuat 9 (Sembilan) tulisan yang mengutamakan karya-karya ilmiah berupa hasil-hasil penelitian/pemikiran ilmiah para peneliti di instansi pemerintah, lembaga-lembaga penelitian, akademis dan praktisi hukum. Diharapkan dari hasil penerbitan *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* ini bisa bermanfaat bagi pemangku kepentingan sebagai bahan hukum regulasi dan non regulasi yang berupa kebijakan dalam pengembangan hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah.

Dalam terbitan Volume 17 Nomor 2 Tahun 2017 ini, redaksi secara khusus mengangkat beberapa tulisan mengenai permasalahan-permasalahan di bidang hukum khususnya Pemasyarakatan yang sampai saat ini menjadi sorotan publik terkait pemenuhan hak dan kewajiban Narapidana yang menimbulkan kontroversi, disamping persoalan-persoalan Kebijakan dan Strategi Pembangunan Hukum dalam Memperkuat Ketahanan Nasional. Kami menyampaikan terima kasih kepada penulis yang telah memberikan kepercayaan kepada *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* untuk menerbitkan hasil karyanya.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada **Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI** dan **Ikatan Peneliti Hukum Indonesia** yang telah berkenan dalam penerbitan *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. DR.. Rianto Adi, S.H., M.A., Bapak DR. Ahmad Ubbe, S.H.,M.H, Ibu DR. Farhana, S.H.,M.H., Bapak DR. Hadi Supraptikta, Bapak DR. Ridwan Nurdin, MA selaku Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulils.

Jakarta, Juni 2017

Redaksi

**The keywords notes here are The Words which represent the concept applied in Article.
This abstract sheet may be reproduced without any permission and free or charge**

Ahyar Ari Gayo (A researcher of the Agency of Research and Development of Law and Human Rights of the Ministry of Law and Human Rights)

LAW ASPECTS OF "JINAYAT QANUN" IMPLEMENTATION IN ACEH PROVINCE

Law Research Journal De Jure, 2017 June , Volume 17, Number 2, Page 131-154

On 2 October 2014, the Aceh's governor has ratified the Aceh Law (Qanun Aceh) Number 6/2014 concerning Jinayat Law and Aceh Qanun on the principles of Islamic Shari'a. Its implementation has led pro-cons, that is refusal and resistance especially non-government organizations both local and international. Then, the questions come up to how the implementation of regulated provisions in Qanun Jinayat. This purpose of this research is to find out the description of the implementation and the Qanun Jinayat law enforcement. It is an empirical law with the qualitative approach. The results of this research stress on no resistances of Qanun Jinayat's implementation in Aceh. It applies only to the Muslim community in Aceh, while non muslims will carry out if they subject themselves against Qanun Jinayat. The conclusion of this research is that Jinayat Law implemented in order to maintain the honour, dignity and to protect the people of Aceh so that they do not conduct immoral behaviour to Allah. Qanun Jinayat implementation proves that degree of violation of the Shari'a turns down amongst the Aceh people.

Keywords: law, qanun, jinayat

Zulfirman (Lector, IHC, Law Faculty of the University of Pembinaan Masyarakat Indonesia, Medan)

THE HUMAN BASIC RIGHTS OF CONTRACT LAW IN INDONESIA: CRITICAL ANALYSIS OF CONTRACT TERMS

Law Research Journal De Jure, 2017 June , Volume 17, Number 2, Page 155-176

A contract is an interpersonal relationship/human basic right. Has Indonesia Contract Law protected human basic right? And what distinction ratio of relative void and absolute of a contract, because there is an opinion in trial practice that distinction is useless. This article aims to research human basic right that protected by the Contract Law and the distinction ratio of contract cancellation. It is a literature/library study constituting an analytic normative juridical study. It uses a law hermeneutic method. Data is secondary data that is primary, secondary and tertiary law material. Data is analyzed qualitatively. Discussion covers basic right in law contract and a basic of a relative void distinction and absolute of a contract. It concludes that Indonesia Contract Law protect rights to life, freedom, and properties as human basic right. A relative void ratio of a contract to preserve an individual sovereignty, an absolute invalidated care Individual and public interest. The judges in finalizing a contract dispute should protect and respect human basic right as law right. A distinction of contract cancellation needs to be maintained in a renewal of Indonesia contract law.

Keywords: basic right, contract law, terms of contract

**The keywords notes here are The Words which represent the concept applied in Article.
This abstract sheet may be reproduced without any permission and free or charge**

Danang Risdiarto (An analyst of Legislation of Agency of National Law Development)

POLICY AND STRATEGY OF NATIONAL LAW DEVELOPMENT IN STRENGTHENING THE NATIONAL HARDINESS

Law Research Journal De Jure, 2017 June , Volume 17, Number 2, Page 177-193

Policy and strategy of national law development as a system is headed to a reality of law system that supports a national interest. Law with its elements takes an important role in order to make a strong national hardness. Based on that, it is necessary to determine a right policy and strategy in making of law development planning in order to make a strong national hardness. This research uses a normative juridical method by doing literature study/review (secondary data) that is regulation, researches, scientific journals, and other references. The result of this research can find out that policy and current law development strategy have not optimized in creating a forceful national hardness, yet. There are still various clefts of law, mainly concerning legislation that rules about territorial and state sovereignty. Therefore, a discussion some legislation related to regional sovereignty of borders urge to be completed. Besides, there is overlapping of authority and regulation amongst institutions in law enforcement concerning waters and air in Indonesia territorial should be found out a comprehensive solution.

Keywords: policy, strategy, law, national hardness

Taufik H. Simatupang (A researcher of Centre for Policy Research and Development, The Agency of Research and Development of Law and Human Rights of the Ministry of Law and Human Rights)

LAW SYSTEM OF INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION IN ORDER TO IMPROVE PEOPLE PROSPERITY

Law Research Journal De Jure, 2017 June , Volume 17, Number 2, Page 195-208

Intellectual property as moral and economic right need to be law protection to create a new invention creativity in technology, make industry development growing fast, open new employment, boost economic growth and increasing quality of human life. The problem that intended to answered in this research is how the law system of intellectual property protection can push creativity in order to improve people prosperity/welfare and how to extend the strategic position and role of the state in giving law protection of intellectual property. This research uses a normative juridical method with primary, secondary and tertiary law material. It concludes that the law protection of intellectual property is will and goal of the state to give recognition, respect, and protection to every citizen who those invent intellectual works. Therefore, the state needs to issue a regulation and creating a condition according to global tendency changes by doing anticipatory steps related to the development and intellectual property protection. Including increase of research institutions and universities role, so that able to produce innovation and technology needed by markets and consumers.

Keywords: law of intellectual property, people prosperity

**The keywords notes here are The Words which represent the concept applied in Article.
 This abstract sheet may be reproduced without any permission and free or charge**

Syprianus Aristeus (A researcher of the Agency of Research and Development of Law and Human Rights of the Ministry of Law and Human Rights)

GLOBALIZATION, FREE TRADE, CAPITAL INVESTMENT, AND ONE DOOR INTEGRATED SERVICES

Law Research Journal De Jure, 2017 June , Volume 17, Number 2, Page 209-230

In order to make national economic development growing fast and to face global economy changes, on 27 April 2007, the government stipulated the Law Number 25/2007 on Capital Investment replaced the Law of Foreign Investment and domestic investment to attract and invest their capital in Indonesia. Both, it gives an incentive in customs and excises, and also provide facility for procedures of capital investment permits. This article discusses the implementation of one door integrated services in capital investment that in fact, it gives easiness for investors to invest their capital in Indonesia that its implementation evidently, uses distinct name or term by institutions that handle it. As for, its practice of capital investment permit, in the future should provide simplicity to investors in around Indonesia with one door integrated services by amendment or replace the Presidential Decree No. 27/2009.

Keywords: capital investment, one door integrated services

Okky Chahyo Nugroho (A researcher of the Centre of Research and Development of Human Rights, The Agency of Research and Development of Law and Human Rights of the Ministry of Law and Human Rights)

LAW ENFORCEMENT AGAINST FOREIGNERS AT IMMIGRATION OFFICE OF DENPASAR (KELAS 1) AND THE IMMIGRATION OFFICE OF NGURAH RAI (KELAS 1 KHUSUS)

Law Research Journal De Jure, 2017 June , Volume 17, Number 2, Page 209-230

Immigration offense is a wrong-doing by foreigners those who own no legal and valid travel document and Visa, expired date of visa, visa abuse and etc. Law enforcement against foreigners that conduct immigration violation can be punished by administrative action or criminal act of immigration (pro justisia). The questions to be answered in this research is how immigration law enforcement by established the foreigner supervision team (TIMPORA) and obstacles be faced in current condition. This research is a descriptive-analysis with qualitative approach. It is intended to describe law enforcement of foreigner supervision. The foreigner supervision has run well as supported by team that give information about the existence of them. As a leading sector of this team, immigration still find problems in its implementation. The problem such as the license of Civil Servant Investigator of Immigration is not applied in other immigration offices jurisdiction, then the lack of facilities and infrastructure including budget to the trial process. And also it is necessary to engage people to supervise existence and activity of the foreigners.

Keywords : law enforcement, supervision, foreigner

**The keywords notes here are The Words which represent the concept applied in Article.
This abstract sheet may be reproduced without any permission and free or charge**

Donny Michael (A researcher of the Centre of Research and Development of Human Rights, The Agency of Research and Development of Law and Human Rights of the Ministry of Law and Human Rights)

ACCOMPLISHMENT OF CONVICT RIGHTS IN THE CORRECTIONAL INSTITUTION OF TANJUNG GUSTU (KLAS 1 A), NORTH SUMATERA IN HUMAN RIGHTS'PERSPECTIVE

Law Research Journal De Jure, 2017 June , Volume 17, Number 2, Page 249-263

Correctional institution as government representative has tried to give the best development services to convicts. In this development context, it attempts to fulfil their rights. This research aims to find out both supporting and obstacle factors and try to discover efforts toward accomplishment convicts rights in the correctional institution of Tanjung Gusta (Klas 1 A), North Sumatera, that suitable in human rights perspective. This research uses a descriptive method with qualitative approach. Collecting data by interviewing informant and interviewees. It also observes at the correctional institution of Tanjung Gusta (Klas 1 A), north Sumatera. The result of this research shows some obstacle factors that is : (1) over crowded of capacity, the lack of budget, and coordination amongst institution still has not optimized, yet, (2) the convicts have both technical and administrative of documents to get their rights, (3) dynamics of law in the treatment of convicts. The supporting factors is sourced from convicts and correctional officers in carrying out development program and legal product such as Form Letter of the Minister of Law and Human Rights particularly related to the provisions of justice collaborator, although it contains controversial items of law perspective.

Keywords : convicts, human rights, correctional institutional

Tony Yuri Rahmanto (A researcher of the Centre of Research and Development of Human Rights, The Agency of Research and Development of Law and Human Rights of the Ministry of Law and Human Rights)

LEGAL CERTAINTY FOR NARCOTICS ABUSERS: CASE STUDY IN EAST JAVA PROVINCE

Law Research Journal De Jure, 2017 June , Volume 17, Number 2, Page 265-282

Narcotics abusers can be sentenced to a jail, but there is an effective way, in regulation such as rehabilitation centre. The purpose of this research is, first, to find out to what extend the imprisonment and rehabilitation program can give legal certainty to users; and second, to know the alternative of treatment given to users. This research uses qualitative approach viewed from legal aspects. The analysis: first, a polemic about legal certainty toward imprisonment sanction or rehabilitation program in the Act regarding Narcotics. Second, the sanction of rehabilitation treatment is still proper for users, but it is needed supervision, seriously so that they have their rights as legal certainty principle. The suggestions: first, regulation should be confirmed that punishment for narcotics users is placed in rehabilitation centre based on a clearly proofs/evidence; second, blend of the same mind-set amongst law enforcers to look narcotics abusers not to judge as offenders or criminals but as victims that need treatment or heal.

Keywords: legal certainty, users, narcotics abuser

***The keywords notes here are The Words which represent the concept applied in Article.
This abstract sheet may be reproduced without any permission and free or charge***

***Jamilus (A researcher of the Agency of Research and Development of Law and Human Rights
of the Ministry of Law and Human Rights)***

***THE PROBLEM TO DO THE EXECUTION BASED ON EXECUTORIAL TITLE OF CERTIFICATE
AND MORTGAGE RIGHT***

Law Research Journal De Jure, 2017 June , Volume 17, Number 2, Page 283-299

Parate executie is to run on its own or take on its own right, that means without the mediation of a judge intermediary, directed at an insurance item to further sell the goods themselves. Parate executie is executed by the holder of guarantee rights (mortgages and hyphotec) without the assistance or intervention of the district court, but only based on the assistance of the State Auction. So it can be understood that the execution of the parate executie is the easiest and simplest way for the creditor to get their claim back, if the debtor has a breach of contract/default compared to the execution by District Court.

Keywords: execution, certificate, mortgage right

Kata kunci bersumber dari Artikel**Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya****Ahyar Ari Gayo (Peneliti Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia)****ASPEK HUKUM PELAKSANAAN QANUN JINAYAT DI PROVINSI ACEH**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Juni 2017, Volume 17, Nomor 2, Halaman 131 – 154

Pada tanggal 2 Oktober 2014 Gubernur Aceh telah mengesahkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam. Pemberlakuan Qanun Aceh ini menimbulkan pro kontra terutama dari kalangan lembaga swadaya masyarakat baik lokal maupun internasional. Pro dan kontra tersebut mengarah pada penolakan dan penentangan terhadap pemberlakuan Qanun Jinayat. Adanya pro dan kontra terhadap penolakan pemberlakuan Qanun Jinayat sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Qanun Jinayat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran tentang pelaksanaan dan penegakan hukum Qanun Jinayat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik dengan pendekatan kualitatif. Dengan jenis dan pendekatan penelitian tersebut, peneliti akan mengumpulkan data yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian ini menekankan bahwa tidak ada pertentangan pemberlakuan Qanun Jinayat di Aceh. Qanun Jinayat berlaku bagi kalangan masyarakat Aceh yang beragama Muslim, sedangkan bagi non muslim berlaku apabila mereka menundukan diri terhadap qanun jinyat. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah hukum jinayat dilaksanakan dalam rangka menjaga harkat, martabat dan memproteksi dan melindungi masyarakat Aceh agar tidak lagi berbuat maksiat kepada Allah. Melalui pelaksanaan Qanun Jinayat berdampak berkurangnya tingkat pelanggaran syariat di tengah-tengah masyarakat Aceh.

Kata kunci: hukum, qanun, jinayat**Zulfirman (Lektor, IHC, Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan)****HAK DASAR MANUSIA DALAM HUKUM KONTRAK INDONESIA: ANALISIS KRITIS SYARAT KONTRAK**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Juni 2017, Volume 17, Nomor 2, Halaman 155 – 176

Kontrak merupakan hubungan interpersonal hak dasar manusia. Apakah hukum kontrak Indonesia melindungi hak dasar manusia, dan apa ratio pembedaan batal relatif dan absolut suatu kontrak, karena ada pendapat dalam praktik pengadilan pembedaan itu tidak ada gunanya. Tujuan artikel ini mengkaji hak dasar manusia yang dilindungi oleh hukum kontrak dan ratio pembedaan pembatalan kontrak. Artikel ini suatu studi kepustakaan merupakan kajian yuridis normatif analitik. Metode yang digunakan hermeneutik hukum, Data yang digunakan data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Data dianalisis secara kualitatif. Pembahasan meliputi hak dasar dalam hukum kontrak dan dasar pembedaan batal relatif dan absolut suatu kontrak. Kesimpulannya hukum kontrak Indonesia melindungi hak hidup, kebebasan dan milik sebagai hak dasar manusia. Ratio batal relatif suatu kontrak untuk melindungi kedaulatan individu, batal absolut melindungi kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Hakim dalam menyelesaikan sengketa kontrak hendaknya melindungi dan menghormati hak dasar manusia sebagai hak hukum. Pembedaan pembatalan kontrak yang ada perlu dipertahankan dalam pembaharuan hukum kontrak Indonesia.

Kata Kunci: hak dasar, hukum kontrak, syarat kontrak

Kata kunci bersumber dari Artikel
Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya

Danang Risdiarto (Analisis Peraturan Perundang-Undangan pada Badan Pembinaan Hukum Nasional)

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN HUKUM DALAM MEMPERKUAT KETAHANAN NASIONAL

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Juni 2017, Volume 17, Nomor 2, Halaman 177 – 193

Kebijakan dan strategi pembangunan hukum nasional sebagai suatu sistem diarahkan pada terwujudnya sistem hukum yang mendukung kepentingan nasional. Hukum dengan elemen-elemennya memegang peranan penting dalam memperkuat ketahanan nasional. Atas dasar itulah maka perlu ditentukan kebijakan serta strategi yang tepat dalam perencanaan pembangunan hukum guna menciptakan ketahanan nasional yang kuat. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, hasil pengkajian dan referensi. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kebijakan serta strategi pembangunan hukum yang ada saat ini belum optimal dalam menciptakan ketahanan nasional yang kuat. Masih terdapat berbagai celah hukum terutama mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah kewilayahan dan kedaulatan negara. Untuk itu pembahasan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kedaulatan batas wilayah perlu untuk segera diselesaikan. Selain itu tumpang-tindih kewenangan dan aturan antar instansi dalam penegakan hukum di wilayah perairan dan udara Indonesia harus pula dicarikan solusinya secara menyeluruh.

Kata Kunci: kebijakan, strategi, hukum, ketahanan nasional

Kata kunci bersumber dari Artikel
Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya

Taufik H. Simatupang (Peneliti pada Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI)

SISTEM HUKUM PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Juni 2017, Volume 17, Nomor 2, Halaman 195 – 208

Kekayaan intelektual sebagai hak moral dan hak ekonomi memerlukan perlindungan hukum untuk menciptakan kreatifitas penemuan baru di bidang teknologi, mempercepat pengembangan industri, membuka lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Permasalahan yang dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem hukum perlindungan kekayaan intelektual dapat mendorong kreatifitas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sejauh mana posisi dan peran strategis negara dalam memberikan perlindungan hukum di bidang kekayaan intelektual. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif memakai bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa perlindungan hukum kekayaan intelektual adalah kehendak dan cita-cita negara untuk memberikan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan kepada setiap warga masyarakatnya yang sudah menghasilkan karya intelektual. Oleh karena itu negara perlu menerbitkan regulasi dan menciptakan kondisi sesuai dengan perubahan kecenderungan global dengan melakukan langkah-langkah antisipasi yang terkait pengembangan dan perlindungan kekayaan intelektual. Termasuk peningkatan peran lembaga penelitian dan Perguruan Tinggi, sehingga mampu menghasilkan inovasi dan teknologi yang dibutuhkan pasar dan konsumen.

Kata Kunci: hukum kekayaan intelektual, kesejahteraan masyarakat

Kata kunci bersumber dari Artikel
Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya

Syprianus Aristeus (Peneliti Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia)

GLOBALISASI, PERDAGANGAN BEBAS, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Juni 2017, Volume 17, Nomor 2, Halaman 209 – 230

Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi nasional serta menghadapi perubahan perekonomian global, pada tanggal 27 April 2007 diterbitkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menggantikan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri untuk menarik investasi dan menanamkan modalnya di Indonesia. Selain memberikan insentif di bidang perpajakan dan pabean juga memberi kemudahan dalam tata cara pemberian izin penanaman modal. Adapun makalah ini membahas mengenai penerapan pelayanan terpadu satu pintu yang telah memberikan kemudahan bagi investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia yang pelaksanaannya ternyata mempergunakan nama atau istilah yang berbeda-beda oleh badan yang menanganinya. Adapun penerapan perizinan penanaman modal di masa yang akan datang harus dapat memberikan kemudahan kepada para penanam modal di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia secara pelayanan terpadu satu pintu dengan mengubah atau mengganti Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009.

Kata Kunci: penanaman modal, pelayanan satu pintu

Okky Chahyo Nugroho (Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM)

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG ASING DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 DENPASAR DAN KELAS 1 KHUSUS BANDARA I GUSTI NGURAH RAI

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Juni 2017, Volume 17, Nomor 2, Halaman 231 – 247

Pelanggaran keimigrasian adalah pelanggaran visa seperti sudah lewat batas berlakunya, penyalahgunaan visa dan sebagainya. Penegakan hukum terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian dapat berupa tindakan administratif maupun tindakan hukum (projustisia). Sedangkan permasalahan yang diangkat mengenai penerapan penegakan hukum yang dilakukan Imigrasi setelah dibentuknya Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) dan kendala yang dihadapi dengan kondisi sekarang. Penelitian ini bersifat dekriptif-analisis dengan pendekatan kualitatif, yang mana berupaya memperoleh gambaran mengenai penerapan penegakan hukum terhadap pengawasan orang asing. Pengawasan orang asing berjalan dengan baik karena didukung oleh keberadaan Timpora dalam memberikan informasi terkait keberadaan orang asing Meskipun Timpora dibentuk dengan *leading sector* di Imigrasi namun masih ditemui kendala. Kendala tersebut adalah mengenai Surat Izin Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tidak dapat berlaku di Kantor Imigrasi lain meskipun masih di Bidang Pengawasan dan Penindakan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan termasuk dana untuk berproses peradilan yang masih kurang, dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan.

Kata Kunci: penegakan hukum, pengawasan, orang asing

Kata kunci bersumber dari Artikel**Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya**

Donny Michael (Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)

PENERAPAN HAK-HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I A TANJUNG GUSTA, SUMATERA UTARA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Juni 2017, Volume 17, Nomor 2, Halaman 249 – 263

Lembaga Pemasyarakatan sebagai representasi pemerintah telah berupaya memberikan pelayanan pembinaan kepada Narapidana dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks pembinaan ini pula diupayakan agar hak-hak Narapidana terpenuhi. Penelitian bertujuan menemukan faktor pendukung dan penghambat penerapan hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I ATanjung Gusta, Sumatera Utara, serta menemukan upaya penerapan hak-hak Narapidana yang sesuai dengan perspektif HAM. Metode penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dengan informan dan narasumber serta observasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Tanjung Gusta, Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan faktor penghambat dalam penerapan hak-hak Narapidana antara lain (1) relatif bersifat klasik normatif yang terjadi sejak lama tentang kelebihan narapidana, keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antar instansi, (2) maupun bersifat teknis dan administratif dokumen yang harus dimiliki Narapidana untuk dapat memperoleh hak-haknya, (3) dinamika hukum dalam perlakuan terhadap Narapidana. Faktor pendukung dalam penerapan hak-hak Narapidana bersumber dari pihak Narapidana dan petugas Lapas dalam menjalankan program pembinaan di Lapas serta produk hukum berupa Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI khusus terkait pelaksanaan ketentuan *justice collaborator*, sekalipun keberadaannya mengandung sisi kontroversial dari perspektif hukum.

Kata Kunci: narapidana, hak asasi manusia, lembaga pemasyarakatan

Kata kunci bersumber dari Artikel
Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya

Tony Yuri Rahmanto (Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)

KEPASTIAN HUKUM BAGI PENGGUNA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA: STUDI KASUS DI PROVINSI JAWA TIMUR

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Juni 2017, Volume 17, Nomor 2, Halaman 265 – 282

Penyalahguna narkotika tidak menutup kemungkinan dapat diancam dengan ancaman pidana penjara namun dalam peraturan masih terdapat cara yang lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk *pertama*, mengetahui sejauhmana pidana kurungan dan program rehabilitasi dapat memberikan kepastian hukum terhadap pengguna; dan *kedua*, mengetahui alternatif penanganan yang diberikan kepada pengguna. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang dilihat dari aspek hukum. Hasil analisis: *pertama*, terdapat polemik tentang kepastian hukum terhadap sanksi pidana kurungan atau program rehabilitasi pada Undang-Undang tentang Narkotika. *Kedua*, sanksi tindakan rehabilitasi masih tepat bagi pengguna, namun diperlukan pengawasan yang serius agar pengguna penyalahguna mendapatkan haknya sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Saran yang diberikan adalah *pertama*, dari jalur regulasi sebaiknya dipertegas bahwa hukuman bagi pengguna adalah rehabilitasi berdasarkan bukti-bukti yang jelas; *kedua*, keterpaduan pola pikir yang sama antara Aparat Penegak Hukum dalam memandang pengguna penyalahgunaan narkotika dimana jangan lagi diposisikan sebagai pelaku tindak pidana namun sebagai korban yang membutuhkan tindakan untuk penyembuhan.

Kata Kunci: kepastian hukum, pengguna, penyalahgunaan narkotika

Jamilus (Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)

PERSOALAN DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI SERTIFIKAT DAN HAK TANGGUNGAN

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Juni 2017, Volume 17, Nomor 2, Halaman 283 – 299

Parate eksekusi adalah menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya, dalam arti tanpa perantara hakim, yang ditujukan atas sesuatu barang jaminan untuk selanjutnya menjual sendiri barang tersebut. Parate executie adalah eksekusi yang dilaksanakan sendiri oleh pemegang hak jaminan (gadai dan hipotik) tanpa melalui bantuan atau campur tangan pengadilan negeri, melainkan hanya berdasarkan bantuan Kantor Lelang Negara saja. Jadi dapat dipahami bahwa pelaksanaan parate executie merupakan cara termudah dan sederhana bagi kreditur untuk memperoleh kembali piutangnya, manakala debitur cidera janji dibandingkan dengan eksekusi yang melalui bantuan atau campur tangan Pengadilan Negeri.

Kata Kunci : eksekusi sertifikat, hak tanggungan